Temanggung Efisiensikan Anggaran Rp 135 Miliar

KR-Zaini Arrosyid

Hari Agung Prabowo

TEMANGGUNG (KR) - Pemerintah Kabupaten Temanggung lakukan efisiensi anggaran di APBD kabupaten tersebut pada tahun 2025 sebesar Rp 135 miliar. Pj Bupati Temanggung Hari Agung Prabowo mengatakan efisiensi anggaran di antaranya untuk menutup defisit keuangan yang diperkirakan mencapai Rp 135 miliar. "Efisiensi ini masih terus dibahas tim anggaran pemerintah daerah (TAPD), " ungkap dia, Rabu (12/2).

Untuk efisiensi ini, Pemkab Temanggung telah mengeluarkan instruksi bupati. Beberapa efisiensi dilakukan di bidang belanja, seperti belanja barang, makan minum, percetakan, listrik dan air. "Belanja harus di efisiensikan agar anggaran betul-betul efektif," tandas Hari Agung.

Dikemukakan, efisiensi anggaran itu akan didiskusikan dan dibahas bersama DPRD untuk mendapatkan persetujuan sebab terkait keuangan harus ada persetujuan dari lembaga legislatif.

Selain efisiensi, lanjut Pj Bupati, pemerintah pusat juga menghapus sejumlah dana ke daerah. Di antaranyai dana alokasi khusus (DAK) dan dana untuk infrastruktur jalan. Sementara dana transfer masih dipelajari, apakah ada rasionalisasi atau tidak. "Dana transfer masih menunggu petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknisnya," jelasnya.

Dia mastikan untuk pelayanan dasar pemerintah tetap berjalan dan tetap menjaga kualitas atau tidak ada pengurangan karena pelayanan masyarakat tidak boleh dibatasi dan terganggu. Dikatakan, pemberian makan bergizi gratis tetap berjalan dan diutamakan karena program astacita presiden Prabowo.

"Instruksi dari menteri dalam negeri juga memastikan Visi Misi Kepala Daerah harus sesuai dengan visi misi Presiden. "Jadi, makan bergizi gratis tetap berjalan di Kabupaten Temanggung," tegas Hari Agung. **(Osy)-f**

MENJELANG PELANTIKAN BUPATI-WABUP SUKOHARJO

Polres Gelar Latihan Pengendalian Massa

SUKOHARJO (KR) - Polres Sukoharjo menggelar latihan pengendalian massa (Dalmas) di Lapangan Presisi Polres Sukoharjo, Rabu (12/2), dipimpin Wakapolres Sukoharjo Kompol Pariastutik. Kegiatan ini dimaksud untuk meningkatkan kesiapan personel dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas) menjelang pelantikan Bupati dan Wakil Bupati Sukoharjo hasil Pilkada 2024.

Latihan pengendalian massa diikuti oleh 174 personel yang terdiri dari anggota Satsamapta, Polwan, serta anggota Polsek jajaran. Materi pelatihan diberikan oleh Kasat Samapta AKP Sri Haryanto, dengan fokus pada ketentuan dalam Perkap Nomor 01 Tahun 2009 tentang Penggunaan Kekuatan Kepolisian serta Perkap Nomor 16 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengendalian Massa.

Kapolres Sukoharjo AKBP Anggaito Hadi Prabowo menyampaikan bahwa latihan ini untuk meningkatkan profesionalisme personel dalam menangani berbagai situasi yang memerlukan tindakan pengendalian massa secara efektif dan sesuai prosedur. "Kami berkomitmen untuk selalu meningkatkan kemampuan personel dalam menghadapi berbagai dinamika Kamtibmas, khususnya menjelang pelantikan kepala daerah hasil Pilkada serentak," jelasnya.

Dengan latihan ini, lanjut Kapolres, pihaknya dapat memastikan bahwa anggota di lapangan memahami tahapan pengendalian massa dan dapat bertindak sesuai dengan aturan yang berlaku. Latihan juga menggunakan berbagai peralatan pendukung, seperti peralatan Dalmas, kendaraan Rainmas, kendaraan taktis (Rantis), serta mobil public address untuk mendukung komunikasi di lapangan.

Sebelumnya, Polres Sukoharjo juga menggelar apel pasukan Operasi Keselamatan Candi 2025 di lapangan Presisi Polres Sukoharjo, Senin (10/2). Apel yang dipimpin Kapolres Sukoharjo itu menandai dimulainya operasi ykeselamatan ang berlangsung selama 14 hari, 10-23 Februari 2025. "Operasi Candi 2025 digelar untuk meningkatkan kepatuhan dan disiplin masyarakat dalam berlalu lintas serta menurunkan angka pelanggaran maupun kecelakaan lalu lintas.

KR-Dok Polres Sukoharjo

Latihan pengendalian massa menjelang pelantikan Bupati dan Wakil Bupati Sukoharjo.

"Operasi Keselamatan Candi 2025 di wilayah hukum Sukoharjo mengedepankan kegiatan preemtif dan preventif yang disertai dengan penegakan hukum secara humanis dan edukatif. "Saya berharap jajaran satuan lalu lintas mampu mengubah mindset masyarakat agar lebih sadar dan taat aturan lalu lintas. Jika kerjasama antara Polri, TNI, pemerintah, dan masyarakat terjalin dengan baik, maka kamseltibcarlantas akan tercipta secara alami," tegas AKBP Anggaito Hadi Prabowo. **(Mam)**

TOLAK DUALISME KEPEMIMPINAN DPP

GMNI Jateng Akan Gelar Kongres

KARANGANYAR (KR) - Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Jawa Tengah mendesak segera digelar kongres persatuan untuk menyudahi dualisme kepengurusan di tingkat DPP. Adanya kisruh di tingkat pengurus pusat membuat organisasi ini runyam karena GMNI pusat terbelah menjadi kubu Imanuel dan kubu Arjuna.

KR-Istimewa

Pengurus DPD GMNI Jateng serta stakeholder usai aksi pernyataan sikap.

"Sudah enam tahun terjadi dualisme kepengurusan. Kondisi ini menjadi faktor penghambat roda organisasi dan kaderisasi, juga berakibat pada suatu kondisi yang kontra revolusioner serta memicu narasi perpecahan di tingkatan daerah," kata Ketua DPD GMNI Jateng, Andi Harisa Pane, Rabu (13/2).

Menurutnya, kisruh itu berlarut-larut usai kongres di Ambon pada 2019 lalu. Guna menyikapi kondisi tersebut, ia bersama 23 DPC GMNI Kabupaten/-Kota se-Jateng menuntut untuk segera dilaksankanya kongres persatuan dalam tubuh DPP GMNI. "Bentuk keprihatinan kami di daerah, menggelar aksi pernyataan sikap. Pertama, menolak dualisme kepemimpinan dalam tubuh GMNI," tandas Andi.

Kedua, mendesak segera diselenggarakannya Kongres Persatuan. Ketiga, tidak melegitimasi Dewan Pimpinan Pusat (DPP) manapun sampai adanya Kongres Persatuan. Keempat, tidak akan ikut serta apabila kongres hanya diselenggarakan hanya oleh salah satu kubu Dewan Pimpinan Pusat (DPP) GMNI.

"Apabila kedua DPP tidak mampu menyelenggarakan kongres persatuan. DPD-DPC GMNI se-Jawa Tengah bersedia menfasilitasi penyelenggaraan kongres persatuan," tegas Andi Pane.

Andi mengatakan pernyataan sikap ini dilakukan untuk menyadarkan kedua belah pihak. Harapannya, DPP GMNI agar kembali pada tanggung jawab mereka sebagai pengurus dan mematuhi aturan organisasi. Aaksi pernyataan sikap tersebut diikuti kurang lebih 70 tamu undangan yang terdir dari jajaran pengurus DPD GMNI Jawa Tengah dan perwakilan dari 23 DPC GMNII de-Jawa Tengah. **(Lim)-f**

CIPTAKAN EKONOMI DIGITAL

Bank BPD DIY Dukung Aktivasi IKD

KR-Istimewa

Pegawai Bank BPD DIY melakukan aktivasi IKD dibantu petugas Dinas Dukcapil DIY.

YOGYA (KR) - Bank BPD DIY sebagai Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang dimiliki Pemda DIY dan Pemkab/Pemkot se-DIY mendukung penuh program digitalisasi identitas kependudukan. Program layanan jemput bola aktivasi Identitas Kependudukan Digital (IKD) yang diinisiasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Kalurahan, Kependudukan dan Pencatatan Sipil (PMK Dukcapil) DIY tersebut digencarkan dalam rangka mendorong kepemilikan IKD di DIY.

Layanan jemput bola aktivasi IKD pada 2025 ini menyasar seluruh instansi dan Organisasi Perangkat Daerah (OPD), termasuk BUMD di lingkungan Pemda DIY. Bank BPD DIY mendapatkan jadwal layanan jemput bola aktivasi IKD di Kantor Pusat Bank BPD DIY, Rabu (12/2). Sebanyak 225 pegawai dari total sekitar 1.600-an pegawai Bank BPD DIY berhasil aktivasi IKD.

Direktur Utama (Dirut) Bank BPD DIY Santoso Rohmad menilai, program layanan jemput bola ini sangat bagus dan pihaknya mendukung apa yang menjadi program Pemerintah berkaitan dengan digitalisasi identitas kependudukan. Program akan mempercepat proses digitalisasi perbankan atau menciptakan ekosistem digital dalam perbankan. **(Ira)-f**

Harvey ..... Sambungan hal 1

Penambahan hukuman tersebut ditetapkan setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta menerima permintaan banding dari penuntut umum dan Mochtar.

"Mengubah putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta pada Pengadilan Negeri (PN) PN Jakarta Pusat yang dimintakan banding mengenai lamanya pidana penjara dan pidana tambahan uang pengganti," kata Hakim Ketua Catur Iriantoro dalam pembacaan putusan banding oleh majelis hakim di Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, Kamis.

Selain pidana penjara, Majelis Hakim turut memperberat pidana denda yang dijatuhkan kepada Mochtar menjadi Rp 1 miliar, dengan ketentuan apabila tidak dibayar maka akan diganti (subsider) 6 bulan kurungan. **(Ant/Obi)-d**

Hasto ..... Sambungan hal 1

Selatan pada Jumat (10/1) melawan KPK. Permohonan praperadilan tersebut teregister dengan nomor perkara 5/Pid.Pra/2025/PN.Jkt.Sel.

Penyidik KPK pada 24 Desember 2024, menetapkan dua tersangka baru dalam rangkaian kasus Harun Masiku, yakni Hasto Kristiyanto (HK) dan advokat Donny Tri Istiqomah (DTI). KPK menegaskan sudah mengikuti prosedur dengan mengumpulkan bukti, tahapan penyelidikan dan penyidikan untuk penetapan tersangka Hasto terkait kasus suap dan perintangan penyidikan Harun Masiku.

Sebelumnya, Ketua KPK Setyo Budiyanto mengungkapkan bahwa HK mengatur dan mengendalikan DTI untuk melobi anggota KPU RI Wahyu Setiawan agar dapat menetapkan Harun Masiku sebagai calon anggota DPR RI terpilih dari Dapil Sumatera Selatan (Sumsel) I. HK juga diduga mengatur dan mengendalikan DTI untuk aktif mengambil dan mengantarkan uang suap untuk diserahkan kepada Wahyu Setiawan melalui Agustiani Tio Fridelina. **(Ant/Has)-f**

Razman- ..... Sambungan hal 1

"Serta selalu berkoordinasi dengan pihak kepolisian dalam mengamankan persidangan," tegas Yanto.

Berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Ambon Nomor 44/KPT.W27-U/HM.1.1.1/II/2025, berita acara sumpah advokat Razman dibekukan karena kegaduhan di PN Jakarta Utara, Kamis (6/2). Kegaduhan itu dinilai berimplikasi pada citra, muruah, dan wibawa pengadilan. "Advokat Razman Arif telah terbukti melanggar kode etik advokat Indonesia dan dijatuhi sanksi pemberhentian tetap sebagai advokat," demikian petikan penetapan tersebut.

Pertimbangan yang sama juga menjadi alasan pembekuan berita acara sumpah advokat Firdaus dalam Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Banten Nomor 52/KPT.W29/HM.1.1.1/ll/2025. Firdaus dinilai melanggar poin sumpah atau janji menjaga tingkah laku dan menjalankan kewajiban sesuai dengan kehormatan, martabat, dan tanggung jawab sebagai advokat. **(Ant/Has)-d**

Prabowo ..... Sambungan hal 1

Terakhir Prabowo diminta oleh seluruh peserta kongres untuk menjadi formatur tunggal partai. Hal ini membuat Prabowo mendapatkan mandat untuk menyempurnakan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, serta susunan pengurus DPP Partai Gerindra. Dengan adanya keputusan dalam KLB ini, Muzani berharap seluruh kader tingkat pusat hingga daerah mau mendukung Prabowo dalam mewujudkan cita-cita bangsa.

"Kami berharap dukungan terus menempel kepada beliau selama lima tahun ke depan, sehingga beliau memiliki keyakinan dan semangat untuk menjalankan tugasnya," tegas Muzani. **(Ant)-f**

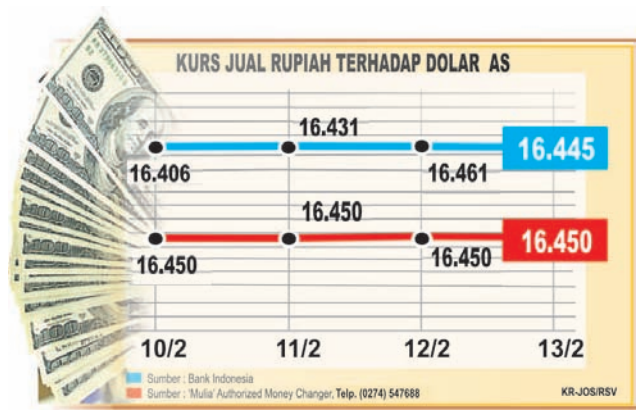

Prakiraan Cuaca — 14 Februari 2025

Lokasi	Cuaca: Pagi	Siang	Malam	Dini Hari	Suhu °C	Kelembaban
Bantul					22-30	65-95
Sleman					22-29	65-95
Wates					22-29	65-95
Wonosari					22-30	65-95
Yogyakarta					22-30	65-95

Cerah, Berawan, Udara Kabur, Hujan Lokal, Hujan Petir

Grafis : Arko

Menggugat Dunia Pendidikan

Dr Junaidi, SAg MHum MKom
Dosen Ilmu Komunikasi
Universitas Amikom Yogyakarta

SAAT saya mengajar matakuliah filsafat salah satu kampus di Yogyakarta, ada mahasiswa yang bertanya soal kekecewaan dan perlawanan terhadap pendidikan formal. Menurutnya pendidikan formal saat ini kaku, linier dan mengutamakan gelar akademik saja. Ironisnya, hanya pendidikan formal yang dianggap sebagai tempat sah belajar dan menuntut ilmu.

Sekolah dan belajar secara filosofis kognitif jelas berbeda. Sekolah belum tentu melakukan aktivitas belajar sesungguhnya. Artinya, gagasan 'wajib belajar' seyogya harus dikaji ulang. Sebab substansi konsep itu bukan wajib belajar, melainkan 'wajib sekolah'. Regulasi pendidikan nasional yang memonopoli sekolah dan kampus sebagai satu satunya 'tempat belajar' yang sah menjadikan masyarakat salah kaprah.

Pertanyaan kita adalah apakah sekolah dan kampus sudah menjamin masa depan?. Apa sebemarnya masalah mendasar pendidikan kita?. Pertanyaan ini tidak pernah kita jawab dengan kepala dingin, padahal jawaban itu seharusnya menjadi pusat dari segala gagasan kita merumuskan kebijakan kebaikan mutu pendidikan. Selama ini perubahan kebijakan dan aturan pendidikan lebih berorientasi untuk mengatasi fenomena ketimbang mencari akar masalahnya. Gejala itu antara lain lemahnya kompetensi lulusan, rendahnya produktivitas dan kualitas karya ilmiah, serta maraknya perilaku tidak terpuji semeisal korupsi di wilayah pendidik.

Berpikir Mandiri

Berangkat dari pergulatan dan pengalaman menjelajahi dunia pendidikan di Yogyakarta lebih dari 20 tahun, saya cukup yakin bahwa persoalan mendasar pendidikan itu adalah kegagalan kita mengantarkan anak-anak dan generasi muda berpikir mandiri. Ketidakmandirian berpikir ini sudah sampai pada tahap akut sehingga banyak sarjana kita tidak berani dan tidak bisa membuat kalimat sendiri. Maraknya plagiasi bukti nyata rendahnya keberanian dan kemandirian berpikir.

Fenomena yang tidak kalah penting adalah yang sangat menyesakkan dada maraknya tuntutan memakai perangkat lunak untuk menguji kesamaan (similarity) sebuah dokumen yang ada. Tuntutan ini bukan hanya untuk karya ilmiah tetapi sudah menyasar pula dokumen laporan umum seperti deskripsi diri dalam portofolio dosen maupun borang akreditasi. Kita bisa bayangkan betapa akutnya persoalan kemandirian berpikir ini bila untuk memformulasikan dirinya sendiri saja, seseorang tidak mampu dan akhirnya menempuh jalan pintas menjiplak tulisan orang lain.

Ada banyak kasus dan fenomena serupa di berbagai tingkat. Mahasiswa kita sangat kesulitan bila diminta merumuskan sesuatu dengan bahasanya sendiri. Beberapa mahasiswa yang mengerjakan misalnya ujian tengah semester atau ujian akhir semester serta menulis karya ilmiah akademik tidak mampu berussha merumuskan sendiri bahasa yang akan digunakan dalam menjelaskan substansi materi yang akan disampaikan. Pada tingkat pendidikan yang lebih rendah, kita pun dengan mudah menemukan fenomena bahwa anak-anak kita kehilangan keberanian untuk berpikir dan berpendapat dan mengemukakan masalahnya sendiri. Data yang paling kentara adalah rendahnya nilai anak-anak kita menyelesaikan soal-soal yang membutuhkan kemampuan berpikir aras tinggi (higher order thingking) sebagaimana mestinya. Situasi dan kondisi pendidikan kita seperti ini akhirnya mewujudkan ke dalam kehidupan sekolah yang cenderung tidak bergairah, formalistik dan tidak kontekstual dengan lingkungan dan keseharian hidup.

Dampak yang lebih jauh adalah akhirnya anak-anak kita di sekolah kehilangan kegembiraan, antusiasme, otentisitas, kepercayaan diri dan rasa tanggungkawab. Ini semula tentu berawal dari mandegnya keberanian berpikir mandiri atau merdeka berpikir. Ketakutan untuk berpikir mandiri ini sangat fatal karena telah bermuara pada lahirnya generasi yang tidak percaya diri, takut bersikap, mudah dimanipulasi dan matinya naluri potensi uniknya.

Lebih ironis lagi, generasi spserti ini kurang kreatif, tidak berani berusaha mandiri yang penuh resiko, serta kurang kritis terhadap realitas sekitar hidupnya. Bahkan yang lebih mengkhawatirkan adalah rentannya mereka dimobilisasi secara politis karena lemahnya kemampuan berpikir kritis. Realitas pahitnya dunia pendidikan kita ini terasa semakin pahit bila kita tempatkan dalam konteks perkembangan era reformasi ini. Bagaimana mungkin kreativitas dan inovasi dapat tumbuh dari generasi yang tidak berani dan punya nyali berpikir sendiri. Semoga!.

UNIVERSITAS AMIKOM YOGYAKARTA
Creative Economy Park